

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan kemajuan disegala bidang, dan sekaligus menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Dampak kemajuan teknologi yang sangat menonjol ini menjadi dampak global, sehingga dewasa ini menjadi perhatian semua negara didunia. Dampak lingkungan hidup yang sudah mengglobal ini tidak semata-mata akibat kemajuan teknologi yang pesat, tetapi akibat ulah manusianya. Di Indonesia sampah merupakan benda yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, seiring bertambahnya penduduk yang berurbanisasi dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan rumah tangga semakin besar, dan menimbulkan dampak buruk seperti sampah. Sampah seolah-olah tidak memiliki manfaat apapun dan dianggap sebagai sumber bencana alam seperti banjir, wabah dan lain sebagainya.

Pemecahan terhadap persoalan krisis lingkungan yang kini melanda seluruh dunia tidak hanya terletak pada segi teknis atau ekonomis. Persepsi seorang individu terhadap alam sering kali mempengaruhi tindakan-tindakannya. Imaji yang merupakan citra manusia tentang alam, akan langsung berpengaruh pada perbuatan-perbuatan, kepercayaan tingkah laku sosial, dan kehidupan pribadi manusia. Maka, cara kita hidup sebenarnya merupakan cara pandang kita terhadap dunia. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan cara pandang, sikap dan perilaku semua manusia terhadap lingkungan, bumi kita, dan alam.

Mengenal lingkungan hidup serta memahami pula etika lingkungan yang tidak *superior* terhadap alam, maka diharapkan kita akan mampu mengelola kehidupan dalam lingkungan hidup yang rumit seperti sekarang ini. Bila hal ini terwujud akan tercipta keharmonisan atau keserasian hubungan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, dengan makhluk hidup/atau sesama manusia, dengan lingkungan hidup yang makin indah, menyenangkan, aman dan nyaman.

Kegiatan manusia sadar lingkungan perlu ditingkatkan. Masalah utama yang menonjol adalah hubungan antara manusia dalam mencari kehidupan maupun dalam meneruskan keturunannya, dapat menimbulkan masalah kelestarian sumber daya yaitu kerusakan yang timbul akibat ulah manusia itu sendiri. Penggunaan teknologi yang kurang terkendali justru akan lebih memperparah rusaknya lingkungan. Ruang lingkup lingkungan sangat luas, dari langit atau udara, dari kutub utara sampai kutub selatan, puncak gunung, kota, desa, lembah, sungai, laut dan lain-lain. Karena itu kesadaran lingkungan menjadi paling penting dan pendidikan kependudukan dan lingkungan bagi setiap orang baik nasional maupun internasional, justru menjadi mutlak karena manusia dan lingkungan itu merupakan dua unsur pokok yang saling menentukan, dalam arti manusia hidup dari lingkungan dan jika rusak maka manusia yang celaka.

Kebersihan lingkungan adalah hal yang patut diperhatikan dengan baik. Dengan lingkungan yang terawat dan bersih akan terciptanya lingkungan yang sehat dan masyarakatpun akan terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik. Untuk menghindari permasalahan tersebut, pemerintah setiap daerah Kota ataupun Kabupaten harus membuat

sebuah kebijakan untuk pengelolaan lingkungan agar terawat dan terjaga kebersihannya. Salah satu daerah di Jawa Barat yaitu Kota Tasikmalaya telah menerapkan kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Di Kota Tasikmalaya masih banyaknya daerah-daerah yang terdapat penumpukan sampah, bahkan sampah tersebut tidak diangkut hingga beberapa hari sehingga masyarakat kebingungan untuk membuang sampah.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 pasal 9 (1) tentang retribusi yang dimaksud pasal 4 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi :

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Peraturan daerah tersebut telah dijelaskan bahwasannya retribusi sampah yang telah terkumpul akan disalurkan untuk menangani persampahan yang ada di daerah. Retribusi tersebut akan digunakan untuk membiayai pengambilan atau pengumpulan sampah, lalu pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir, dan yang selanjutnya untuk penyediaan lahan atau lokasi pembuangan akhir sampah.

Pemerintah Kota Tasikmalaya terkesan lambat dalam menangani masalah sampah yang kerap menggenangi di tepi jalan ataupun di tempat pembuangan sementara. Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Kebijakan

Pemerintah Mengatasi Permasalahan tentang Pengelolaan Sampah, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah termasuk masalah pembiayaan.

Dikutip dari Tribun Jabar pada tanggal 16 Februari 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya akui sarana prasarana pengelolaan sampah masih belum memadai. Produksi sampah per hari di Kota Tasikmalaya yang tercatat 156 ton sampah belum semuanya dikelola secara maksimal. Kepala bidang pengelolaan sampah, DLH Kota Tasikmalaya, Iwan Setiawan, mengatakan ratusan ton sampah itu setiap harinya mengandalkan diangkut sebanyak 20 truk angkut sampah. Jumlah 20 truk sampah belum bisa mencakup semua kecamatan di Kota Tasikmalaya. Adapun sarana dan prasarana lainnya yang masih dibutuhkan yaitu bank sampah. Di Kota Tasikmalaya terdapat 65 titik, padahal idealnya setiap RW memiliki satu bank sampah sehingga masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Dengan kurangnya sarana dan prasarana tersebut mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa titik di Kota Tasikmalaya hingga ditepi jalan.

Gambar 1.1

Sampah Liar di Jalan Letjen Mashudi



Sumber Tribun Jabar (2019)

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 pasal 9 tentang Pengelolaan Sampah”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah.
2. Masih banyaknya penumpukan sampah di beberapa daerah di Kota Tasikmalaya.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah di atas menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya?
2. Apa faktor penghambat sehingga kurangnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelengkap sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Secara Teoretis
 - a. Dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam perkara Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya.
 - b. Dapat mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam keberhasilan Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan.
 - d. Penelitian ini menjadikan wawasan pembaca mengenai implementasi Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut baik dalam bidang kebijakan maupun dalam bidang lainnya.
- b. Untuk menambah motivasi dan memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan.
- c. Agar dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penelitian-penelitian lainnya.

F. Kerangka Pemikiran

Kebijakan dirumuskan oleh Miriam Budiardjo (2008:20) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilihtujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu sendiri. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian secara seksama.

Untuk meneliti pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tersebut, Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Leo Agustino (2017). Adapun menurut Van Metter dan Van Horn di kutip oleh Leo Agustino (2017: 133-136) menyatakan bahwa

terdapat enam dimensi yang dianggap mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakannya memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik sehingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpeting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya.

4. Sikap Kecendrungan (*Disposition*) Agen Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan di implementasikan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak pernah menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin warga selesaikan.

5. Komunikasi antar organisasi dan Ativitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinyanya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perpekstif yang ditawarkan oleh Agustino adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi kegagalan kerja implementasi kebijakan.

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran



Hasil penelitian (diolah peneliti) 2019